

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AP. Parlindungan. *Komentor atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju. Bandung. 1993.
- Arie S. Hutagalung, “*Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum*” (Jakarta:LPHI, 2005),
- Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015),
- Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Bandung: Djambatan, 2003),
- Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Perkembangan Pemikiran Hasilnya Sampai Menjelang Kelahiran UUPA tanggal 24 September 2007*, Cet. Ketiga, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2007),
- B.F. Sihombing, *Evaluasi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Nasional*, Cet. 2, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2004
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 2003),
- Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Cet. Kedua, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2007)
- Gunanegara, *Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta : Tata Nusa, 2008),
- G. Kartasapoetra, *Masalah Pertanahan Di Indonesia* (Jakarta : PT Bina Aksara, 1986)
- Irene Eka Sihombing, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2008),.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta, Kompas 2009)
- Meray Hendrik Mezak “Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum” Law Review Vol. V No. 3–Maret 2006,
- Mudakir Iskandarsyah, *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Jakarta : Jala Permata Aksara,2014),

- Muchsin, Imam Koeswoyo, *Aspek Kebijakan, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
- Nazir Chatib, *Tata Laksana Pengurusan Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, 1985),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
- _____, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana, 2014),
- Roihan A. Rasjid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali Pers, 1991),
- Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek* (Jakarta : CV Mandar Maju, 2013),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, Cet. 3, 1986)
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007),
- Sulaikin Lubis *et. al.*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2008),.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Andi, 2000,
- Tjahjo Widiyanto, *“Kedudukan Girik Setelah Berlakunya UUPA”* (Jakarta : Prima Infosarana Media, 2009),
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012),
- Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2015),
- _____, *“Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Perusahaan Swasta”*, (Jurnal Hukum Pro Justitia, 2010),
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, Cet 5, 2014),

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Dasar 1945;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Tanah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah;

Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

WEBSITE

<http://irmadevita.com/2012/bagaimana-cara-mensertifikatkan-tanah-girik/> (2 Januari 2015).

<http://www.hukumproperti.com/tag/pengadaan/> (20 November 2015).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e4ced09c8bca/pengajuan-surat-pelepasan-hak-atas-tanah-ke-kantor-pertanahan> (21 November 2015).

<http://www.negarahukum.com/hukum/panitia-pengadaan-tanah.html> (07 Januari 2016).

<http://www.izinbangunan.com/perizinan.php?sid=4>, (10 Januari 2016).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5382/pelepasan-hak-milik>, (10 Januari 2016).

